

**ANALISIS AKUMULASI MODAL MANUSIA DENGAN TINGKAT  
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PARTISIPASI  
SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH  
(Studi Kasus Di Propinsi Jawa Timur)**

**Dr. David Sukardi Kodrat, MM**

**Fakultas Ekonomi Program Studi *Internasional Business Management*  
Universitas Ciputra, Surabaya**

**ABSTRACT**

*Based on structure of employment status in Province of East Jawa City Area 2005, labor force participation rate in each city area is from 48.70 percent to 53.98 percent, highest in Surabaya City and lowest in Probolinggo City.*

*School participation rate status never/not yet attended school at most found in Probolinggo City about 11.28 percent and smallest amount in Surabaya City about 3.33 percent. Status attending school at most found in Malang City about 25.98 percent and smallest amount in Probolinggo City about 16.99 percent and status attending school anymore at most in Mojekerto City about 78.99 percent and smallest amount in Malang City about 70.14 percent.*

*Based on this condition, it is needed policy for increasing labor force participation rate and school participation rate with: (1) determine of special skill is needed, (2) determine of special training to increase skill and (3) determine of institution for special training support. Education will increase the opportunity to get a job or to make a new business and society who possess quality in human capital stock.*

*Key word: Labor force participation rate, school participation rate, business and human capital accumulation.*

**PENDAHULUAN**

Era globalisasi menuntut suatu negara untuk meningkatkan daya saing. Laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2006 -2007 menunjukkan daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 125 negara. Sementara, negara lain di Asia seperti Singapura berada di urutan ke-5, Malaysia (ke-26) dan Thailand (ke-35) (Kompas, 22 September 2006).

WEF mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (Boediono, 2002). Pertumbuhan yang tinggi di Indonesia pada dekade 1990-an atau sebelum krisis tahun 1997 terutama disebabkan oleh penambahan input berupa akumulasi modal dan tenaga kerja bukannya peningkatan output per satuan waktu (Kompas, 9 Desember 2006). Berdasarkan kajian indikator produktivitas dan daya saing yang dilakukan *The Asian Productivity Organization* (APO), Indonesia memang menunjukkan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang terus menurun.

Indikator utama daya saing daerah adalah: (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrastruktur dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) kelembagaan, (8) *governance* dan kebijakan pemerintah dan (9) manajemen dan ekonomi mikro (Boediono, 2002). Penelitian ini akan mendalami indikator tentang ilmu pengetahuan (pendidikan) dan sumber daya manusia dengan menggunakan tingkat partisipasi sekolah dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Analisis tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat partisipasi sekolah (TPS) dari akumulasi modal manusia (*human capital stock*) tenaga kerja merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan informasi penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja di masa yang akan datang. Arah pembangunan jangka panjang diprioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia yang tangguh, namun bila dikaji dari sektor kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kependudukan, lingkungan, agama, kebudayaan dan lain-lain tampaknya masih sangat memprihatinkan. Bahkan program pendidikan masih berkuat pada pendidikan dasar dan program wajib belajar.

Pembangunan suatu bangsa, fondasi utamanya adalah sumber daya manusia khususnya melalui sektor pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa Vietnam, China, Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan India yang mereka lakukan adalah melalui pembangunan sumber daya manusia dan khususnya melalui pendidikan sebagai mana pernyataan Goh Chok Tong pada The Singapore Expo 2001 (Anwar, 2006).

Daya saing Propinsi Jawa Timur secara nasional menduduki rangking 3 setelah DKI dan Kalimantan Timur (Boediono, 2002). Kekuatan utama Propinsi Jawa Timur terletak pada aspek-aspek: keterbukaan, infrastruktur fisik dan non fisik, penguasaan dan aplikasi IPTEK, kuantitas dan kualitas SDM serta manajemen dan mikroekonomi di tingkat industri dan perusahaan. Namun lemah dalam aspek-aspek kelembagaan dan pemerintahan dan kebijakan pemerintah.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 Propinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 37.070.731 jiwa dengan komposisi 49,33 persen laki-laki dan

50,67 persen perempuan. Pada umumnya mereka lebih banyak terbesar pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) yaitu sebesar 68,76 persen.

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang minimal tamat SLTP ke atas sekitar 35,04 persen. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan menyebabkan seseorang tidak efektif lagi dalam menentukan pekerjaan. Implikasinya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi rendah. Tingkat kesejahteraan rumah tangga direpresentasikan dari besarnya pengeluaran atau konsumsi dalam rumah tangga yaitu sebesar 28,86 persen (Rp 100.000 – Rp 149.000); 22,43% (Rp 150.000 – Rp 199.999); 20,07% (Rp 200.000 – Rp 299.999); 11,68% (Rp 300.000 – Rp 499.999); 5,36% (> Rp 500.000) dan sisanya adalah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran dibawah Rp 100.000).

### **PERUMUSAN MASALAH**

Dari berbagai laporan indikator internasional tentang rendahnya daya saing dan produktivitas yang terus menurun, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “berapa besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat partisipasi sekolah (TPS) di Propinsi Jawa Timur untuk wilayah Kota (Kode 71 – 79) secara keseluruhan dan antar wilayah?”

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya TPAK dan TPB di Propinsi Jawa Timur wilayah Kota secara keseluruhan dan antar wilayah dan untuk mengetahui gabungan kegiatan masyarakat dan mutu sumber daya manusia dilihat dari jenjang pendidikan, produktivitas dan tingkat daya beli masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penentu kebijakan, diharapkan penelitian ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program-program yang ada berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia.
2. Bagi lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan asistensi yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Konsep Daya Saing Global**

Michael Porter menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional adalah produktivitas (Porter, 1990 dan Kompas, 22 September 2006). Produktivitas adalah nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank Dunia mendefinisikan produktivitas sebagai daya saing yang mengacu kepada besaran laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan.

Kedua definisi tersebut memandang daya saing dalam arti luas yaitu meliputi aspek mikro perusahaan dan aspek diluar perusahaan seperti lingkungan bisnis. Aspek-aspek iklim bisnis bersifat *firm specific*, *region specific* dan *country specific*.

*World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Fokusnya adalah kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai dan karakteristik ekonomi yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. *Institute of Management Development* (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola *asset* atau suatu konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan iklim yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.

Dengan demikian, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan daya saing suatu negara. Setidaknya, walau dengan definisi yang tidak begitu seragam, hampir semua ahli mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs, dkk, 2000 dalam Boediono, 2002). Sub bab berikutnya akan membahas konsep daya saing lokal.

### **Konsep Daya Saing Lokal**

Konsep daya saing daerah dibuat oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI). UK-DTI membuat *Regional Competitiveness Indicators* dan *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS). UK-DTI mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis pada suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan tingkat kekayaan yang lebih merata bagi penduduknya.

Definisi daya saing daerah dari UK-DTI dan CURDS bila dibandingkan terdapat kesamaan yang esensial. Dengan memperhatikan berbagai konsep dan definisi tentang daya saing negara atau daerah perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

- a. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Sehingga daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta.
- b. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan akan tetapi termasuk rumah tangga, pemerintah dan sebagainya. Semuanya terpadu dalam sistem ekonomi yang sinergis. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
- c. Tujuan dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk (*level of living*) di dalam perekonomian tersebut.
- d. Kata kunci dari konsep daya saing adalah kompetisi. Maksudnya bahwa daya saing akan kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Adapun indikator utama yang menentukan daya saing daerah adalah: (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrastruktur dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) kelembagaan, (8) *governance* dan kebijakan pemerintah dan (9) manajemen dan ekonomi mikro (Boediono, 2002). Penelitian ini akan mendalami indikator tentang ilmu pengetahuan (pendidikan) dan sumber daya manusia.

### **Perkembangan Teori *Human Capital***

Schultz dan Denison adalah dua orang tokoh yang mengembangkan *human capital theory*. Teori ini dalam dunia pendidikan dikenal sebagai teori kapitalisme pendidikan. Teori kapitalisme pendidikan berawal dari studi ekonomi pendidikan yang lahir di Phoenix Like pada awal tahun 1960-an yang disponsori oleh Becker dan Denison. Teori *human capital* dipopulerkan oleh Schultz tahun 1970-an yang terus berkembang hingga saat ini (Blaug dalam Marhall dan Michael, 1999; dan Cochran dan Malone, 1995).

Teori *human capital* telah diakui peranannya dalam menunjang ekonomi. Jauh sebelum Becker, Denison dan Schultz mencetuskan teori tersebut, Smith telah mengakui peranan pendidikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mengemukakan bahwa teori *human capital*, telah membuktikan keunggulan institusi pendidikan telah berperan besar dan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional (Cochran dan Malone, 1995).

Pendidikan diakui oleh Smith mampu menjadikan individu lebih produktif sekaligus mampu untuk meningkatkan nilai valensi para pekerja. Para pekerja dianggap sebagai

*stock (asset)* nasional. Pendidikan sama dengan investasi kapital manusia. Bagi perusahaan kapital manusia setara dengan kapital fisik (Cochran dan Malone, 1995). Berdasarkan analisis nilai *rate of return*, Smith menganjurkan agar masyarakat dibebaskan dari biaya-biaya sekolah.

Intitusi pendidikan dalam teori *human capital* dipandang sebagai pemasok tenaga kerja yang berhasil meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan meningkatnya mutu sumber daya manusia akan mempunyai dampak terhadap meningkatnya produktivitas. Teori *human capital* dapat diaplikasikan pada berbagai bentuk investasi sumber daya manusia seperti pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, pengalaman, dan pelatihan kerja. Tujuan dalam investasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas organisasi (Wren, 1994). Praktek demikian telah lama diterapkan oleh para ahli manajemen ilmiah sejak Frederick W. Taylor (1856–1915) dan Hendri Fayol (1841–1925). Bahkan praktek ini pun tetap diterapkan dalam manajemen dengan pendekatan hubungan manusia seperti yang dilakukan oleh Elton Mayo (1880–1949), Mary Parker Follett (1868–1933), Argyris, Abraham Maslow, McGregor, Herzberg dan Rensis Likert.

Tahun 1960, Theodore Schultz (Elfindri, 2001) mengembangkan konsep pembentukan modal manusia dan menganalisis tingkat pengembalian investasi melalui pendidikan dan *training*. Semenjak itu, ekonomi pendidikan telah memberikan kontribusi dalam analisis pasar kerja, penentuan tingkat upah, pengeluaran terhadap pelayanan kesehatan dan studi migrasi. Secara singkat, dasar filosofi investasi manusia adalah segala upaya yang dilakukan untuk manusia sendiri sehingga stok modal manusia semakin lama semakin besar.

Hasil penelitian membuktikan bahwa melalui investasi sumber daya manusia maka efisiensi dan produktifitas organisasi akan meningkat sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Career (1999), Naro (2000) dan Morison dan Breen (2003). Career (1999) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap keuntungan dan pertumbuhan unit usaha. Hal ini disebabkan melalui pelatihan pengusaha akan beradaptasi dengan produk yang diinginkan oleh konsumen dari luar negeri. Pelatihan juga akan meningkatkan ketrampilan teknis dan kemampuan manajerial (Morison dan Breen, 2003). Demikian pula Naro (2000) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pengrajin. Namun demikian ada pula investasi sumber daya manusia yang bersifat *under investment*, sehingga melahirkan konsep baru yang dikenal dengan *Technological Functionalism*.

### **Pandangan *Technological Functionalism***

Tantangan dalam teori *human capital* timbul pada saat investasi sumber daya manusia bersifat *under investment*. Artinya setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan tidak terjadi perubahan apapun pada tenaga kerja. Masalah tersebut dijawab oleh teori

*technological functionalism* bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia tidak harus melalui investasi sumber daya manusia tapi dapat melalui pemberdayaan (*empowerment*) sumber daya manusia. Teori *technological functionalism* menunjukkan bahwa faktor-faktor pembawa (*ascription*) yang menyebabkan terjadinya *under investment* seperti status sosial, ekonomi, koneksi, jenis kelamin, keturunan dan karakter individual. Penelitian Moeljadi (1999) menunjukkan hal ini yaitu pelatihan berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja.

Konsep *technological functionalism* menunjukkan bahwa keuntungan potensial perorangan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga akan memberikan keuntungan bagi kelompok, organisasi, masyarakat dan negara. Individu tidak merasa dieksploitasi, dirugikan, disingkirkan, dimarginalkan atau diasingkan. Konsep ini digunakan pula untuk menjawab teori kapital Marx (1818 – 1883) yang memberikan hipotesis bahwa keinginan pemilik alat produksi (kapital) mendapatkan keuntungan lebih akan menimbulkan penindasan, pemaksaan dan pemerasan tenaga kerja. Artinya konsep *technological functionalism* bertentangan dengan teori kapital Marx. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengukur tingkat pengembalian investasi modal manusia.

### **Mengukur Tingkat Pengembalian Investasi Modal Manusia**

Pengeluaran untuk pendidikan dan *training* sebagai modal manusia akan menghasilkan tingkat pengembalian. Pengukuran tingkat pengembalian investasi modal manusia dapat dilakukan dengan tiga cara: (1) *cost – benefit analysis* atau biasa disebut juga analisis *rate of return* (2) Jacob Mincer Model (1958) dan (3) *Net Present Value*

*Cost – benefit analysis* adalah pengukuran terhadap tingkat pengembalian investasi di masa mendatang atau aliran pendapatan yang bersumber dari modal dibandingkan dengan biaya-biaya yang diperuntukkan untuk pengadaan modal. Investasi modal manusia berupa pendidikan, *training* dan pelayanan kesehatan sepanjang investasi tersebut akan meningkatkan penghasilan sepanjang umur perusahaan (*life time earnings*). Manfaat yang diperoleh dari investasi modal manusia berguna untuk individu tersebut dan masyarakat secara keseluruhan (sosial). Manfaat yang diterima oleh masyarakat yaitu peningkatan produktivitas agregatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *Cost – benefit analysis* adalah: peningkatan penghasilan yang tidak disebabkan oleh pendidikan; tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); kemungkinan seseorang memperoleh penghasilan selama hidup individu; waktu tunggu panggilan kerja individu setelah selesai pendidikan; dan penyesuaian terhadap peningkatan produktivitas individu (Elfindri, 2001).

Model Jacob Mincer (1958) menunjukkan cara untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diterima seseorang berdasarkan tingkat pendidikan yang dijalani individu. Bila diperoleh informasi mengenai penghasilan seseorang (Y), waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan (S) dan pengalaman selama bekerja (E) maka dengan

menggunakan fungsi semi log estimasi tingkat pengembalian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\ln Y = a + bS + cE + dEX^2 + e_t$$

**Net Present Value** untuk investasi pendidikan pada jenjang pendidikan  $j$ , *discount rate* sebesar  $i$  maka NPV dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NPV = \sum_{t=1}^n (W_n - W_{h-1})t (1 + i)^{-t} - \sum_{t=-s}^0 (C_n - W_{h-1})t (1 + i)^{-t}$$

Ket:

$W_n$  = pendapatan pada periode  $n$

$W_{h-1}$  = pendapatan seseorang pada jenjang pendidikan  $h-1$

$t$  = tahun pertama sampai masa pensiun

$-s$  = lamanya mengikuti pendidikan

$C_n$  = biaya sosial pada jenjang pendidikan  $h$

$i$  = *discount rate*

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS)**

Dalam survey sosial ekonomi selalu dikumpulkan data tentang kegiatan ekonomi; dan angkatan kerja meliputi: lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan dan penduduk yang bekerja. Data tersebut dihubungkan dengan GNP per kapita dan alokasi GNP per sektor. Variabel ini merupakan indikator untuk menunjukkan pengaruh pembangunan terhadap penyerapan tenaga kerja (Suwanto, 2006).

Penduduk dan produktivitasnya, khususnya: alokasi angkatan kerja, dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa dianggap sebagai sektor penting untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara atau daerah. Bersamaan dengan itu dapat dilihat data tentang: tingkat pengangguran (*under employment*) dan perubahan alokasi angkatan kerja. Data inilah yang digunakan untuk menyusun strategi negara atau daerah dalam menentukan strategi pembangunan dan rencana investasi (Susenat, 2005).

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000). Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, namun dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut



juga akan mulai berubah sehingga angka TPAK ini juga cenderung untuk meningkat. Bila dilihat dari sisi tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

TPAK dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Angkat TPAK tidak hanya dapat disajikan untuk menghitung TPAK dari seluruh penduduk usia kerja, namun dapat juga digunakan untuk menghitung penduduk usia kerja dengan spesifikasi yang lebih khusus seperti umur, jenis kelamin atau tempat tinggal (desa atau kota). Data yang diperlukan adalah data struktur penduduk usia kerja dan angkatan kerja menurut umur, jenis kelamin dan tempat tinggal.

**Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS)** adalah ukuran seberapa banyak penduduk usia sekolah yang masih bersekolah untuk tingkatan sekolah tertentu (Susenas, 2005). Angka ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Besarnya angka partisipasi kasar (*gross enrollment ratio*) dapat dilihat menggunakan rumus (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000):

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi angka ini berarti semakin banyak penduduk usia sekolah SD/SLTP/SLTA yang bersekolah, sehingga semakin baik.

Di samping itu ada pula ukuran yang disebut sebagai angka partisipasi murni. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah murid usia sekolah yang bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan}} \times 100\%$$

TPAK dan TPS merupakan indeks komposit dari: kegiatan kerja, jenjang pendidikan, dan tingkat kemampuan daya beli (Suwanto, 2006). Dengan menggunakan data tersebut dapat

diketahui bagaimana derajat penyebaran menurut geografis, sosial, budaya dan berbagai pengelompokan yang diperlukan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat partisipasi sekolah (TPS) di Propinsi Jawa Timur wilayah Kota (Kode 71 – 79) secara keseluruhan dan antar wilayah maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Singarimbun dan Effendi (1995) untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Sekaligus penelitian survai dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap: pelaksanaan suatu program (evaluasi formatif) dan tercapainya tujuan program (evaluasi summatif).

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) data ketenagakerjaan terdiri dari: (a) angkatan kerja: bekerja dan mencari pekerjaan dan (b) bukan angkatan kerja: sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain, (2) data status bersekolah: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi dan (3) data tingkat pendidikan dari tidak pernah sekolah hingga pendidikan strata 3 (S3). Data yang dikumpulkan adalah data tahun 2000 dan tahun 2005.

Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dan Surabaya, majalah dan referensi lain yang memberikan informasi tentang ketenagakerjaan dan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

### Konsep dan Definisi Variabel Penelitian

Konsep dan definisi variabel penelitian menggunakan definisi dari Susenas 2005. Adapun definisi masing-masing variabel penelitian sebagai berikut.

- a. **Sekolah** adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar (SD dan SLTP), menengah (SLTA) dan tinggi (perguruan tinggi/akademi), termasuk pendidikan yang setara seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- b. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak yang tidak melanjutkan ke SD/MI dianggap tidak/belum pernah sekolah.
- c. **Masih bersekolah** adalah status dari mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.

- d. **Tidak bersekolah lagi** adalah status dari mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
- e. **Angkatan Kerja (*Labor Force*)** adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa (Lembaga Demografi FE-UI, 1981).
- f. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus oleh kegiatan lainnya.
- g. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.
- h. **Bukan Angkatan Kerja (*Not in the Labor Force*)** adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan (Lembaga Demografi FE-UI, 1981).
- i. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.
- j. **Lainnya** adalah kegiatan selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga. Termasuk di dalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi.

### **Prosedur Analisis**

Prosedur dalam analisis ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan: (1) data ketenagakerjaan terdiri dari: (a) angkatan kerja: bekerja dan mencari pekerjaan dan (b) bukan angkatan kerja: sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain, (2) data status bersekolah: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi dan (3) data tingkat pendidikan dari tidak pernah sekolah hingga pendidikan strata 3 (S3). Data yang dikumpulkan adalah data tahun 2000 dan tahun 2005.
2. Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis TPAK dan TPS. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran seberapa banyak penduduk usia produktif yang masih bekerja. Sedangkan **Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS)** adalah ukuran seberapa banyak penduduk usia sekolah yang masih bersekolah untuk tingkatan sekolah tertentu (Susenas, 2005).
3. Membandingkan dan menganalisis hasil TPAK dan TPS tahun 2000 dengan tahun 2005.

4. Membandingkan dan menganalisis hasil TPAK dan TPS antar wilayah kota Propinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penduduk

Komposisi penduduk di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota mengalami penurunan walaupun jumlah penduduknya mengalami peningkatan dari 4.327.932 jiwa (2000) menjadi 4.717.628 jiwa (2005) atau meningkat sebesar 109%. Pertambahan penduduk tergantung dari selisih antara tingkat kelahiran (natalitas) dan tingkat kematian (mortalitas) ditambah dengan migrasi dalam periode waktu tertentu.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota**

Tahun	Kediri	Blitar	Malang	Probolinggo	Pasuruan	Mojokerto	Madiun	Surabaya	Batu
2000	242.474	119.176	748.031	192.050	167.630	108.855	164.208	2.585.508	-
Distr	5,60%	2,75%	17,28%	4,44%	3,87%	2,52%	3,79%	59,74%	-
2005	254.367	124.944	779.002	205.490	182.072	116.383	170.931	2.698.972	185.467
Distr	5,39%	2,64%	16,51%	4,36%	3,86%	2,47%	3,62%	57,21%	3,93%
Δ%	4,90	4,84	4,14	7,00	8,62	6,92	4,09	4,39	-

Keterangan: Distr = Distribusi jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota  
Sumber: Susenas Propinsi Jawa Timur diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur wilayah kota terbanyak adalah Surabaya. Sedangkan wilayah Malang mengalami pengurangan karena wilayah Batu menjadi wilayah sendiri. Distribusi penduduk tersebar secara tidak merata. Wilayah kota terbanyak penduduknya adalah Surabaya dan diikuti dengan Malang, Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, Blitar dan Mojokerto. Distribusi penduduk ini dari tahun 2000 hingga 2005 tidak mengalami perubahan. Studi ini sama dengan hasil studi Suwanto (2006) yang menunjukkan bahwa pola distribusi penduduk di Propinsi DIY dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Penelitian Jantti (1997) menunjukkan bahwa pergeseran demografi akan mempengaruhi distribusi pendapatan.

Hal-hal yang menyebabkan pertambahan penduduk yang tinggal dalam suatu kota adalah: (1) migrasi masuknya orang-orang dari desa. Apalagi jika diingat bahwa urbanisasi yang bersifat liar atau yang tidak terkendalikan disebabkan oleh tidak amannya kawasan pedesaan, datangnya bencana alam periodik dan gagalnya pembangunan di pedesaan, dan (2) penduduk kota mengalami pertambahan yang alami (Koestoer, dkk, 2001). Migrasi

penduduk antar negara relatif rendah, mengingat begitu sulitnya peraturan-peraturan yang menyangkut perpindahan penduduk antar negara (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000).

Suharso (dalam Koestoer, dkk, 2001) menjelaskan bahwa proses urbanisasi di Indonesia disebabkan oleh *push factor* dan *pull factor*. Ada tiga *push factor* yaitu: (1) perbandingan jumlah penduduk dengan luas tanah di pedesaan yang pincang, (2) kurangnya lapangan kerja di luar bidang pertanian dan (3) rendahnya pendapatan. Sedangkan *pull factor* adalah (1) tarikan kota berupa lapangan kerja, (2) upah yang lebih tinggi dan (3) adanya selingan dan hiburan

*Pull factor* menyebabkan kepadatan penduduk di kota metropolitan Surabaya. Padatnya penduduk kota Surabaya menyebabkan munculnya unsur-unsur marginal (pedagang kaki lima, gubug liar dan kaum gelandangan), kejahatan anak-anak, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, kemacetan lalu lintas, pengangguran dan narkoba. Mereka yang tidak memiliki uang untuk mendirikan rumah tinggal sehingga mereka terpaksa hidup di sembarang tempat. Muncullah perkampungan yang berisi gubug-gubug dari bahan kertas karton, triplek, besi kaleng, plastik dan sebagainya. Ada pula orang-orang yang terpaksa tidur di kios pasar, terminal bus, trotoar dan di bawah jembatan. Kompleks pergubugan kaum miskin yang serba liar ini, memakai istilah gubug reyot atau rumah kardus, yang lokasinya di sembarang tempat, juga disekitar rel kereta api.

**Tabel 2**  
**Struktur dan Komposisi Penduduk di Jawa Timur Wilayah Kota**

Wilayah Kota	2000		2005		Δ% 2005 vs 2000	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Kediri	116.790	125.684	124.183	130.184	6,33%	3,58%
Blitar	56.274	62.902	60.764	64.180	7,98%	2,03%
Malang	366.854	381.177	376.086	402.916	2,52%	5,70%
Probolinggo	91.744	100.306	102.388	103.102	11,60%	2,79%
Pasuruan	84.564	83.066	88.511	93.561	4,67%	12,63%
Mojokerto	53.352	55.503	56.492	59.891	5,89%	7,91%
Madiun	77.102	87.106	82.480	88.451	6,98%	1,54%
Surabaya	1.277.697	1.307.811	1.336.428	1.362.544	4,60%	4,19%
Batu	-	-	92.700	92.767	-	-
Rata-rata	265.547	275.444	290.004	299.700		

Ket: Rata-rata tahun 2005 Kota Batu digabung dengan Kota Malang

Sumber: Susenas Propinsi Jawa Timur diolah

Tabel 2 menunjukkan struktur dan komposisi penduduk Jawa Timur Wilayah Kota tahun 2000 dan tahun 2005 tidak mengalami perubahan di mana persentase laki-laki sebesar 49

persen dan persentase perempuan sebesar 51 persen. Namun, bila diperhatikan dengan lebih cermat komposisi pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan tidak sama. Kediri, Blitar, Probolinggo dan Madiun pertumbuhan laki-laki lebih banyak. Sedangkan Malang, Pasuruan dan Mojokerto pertumbuhan perempuan lebih banyak. Perbedaan struktur dan komposisi pertumbuhan penduduk disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000).

**Tabel 3**  
**Persentase Penduduk Jawa Timur Wilayah Kota Berdasarkan Kelompok Umur**

Wilayah Kota	2000				2005			
	0 – 14 th	15 – 64 th	>64 thn	DR	0 – 14 th	15 – 64 th	>64 thn	DR
Kediri	23,62	69,35	7,03	0,44	24,98	67,26	7,76	0,49
Blitar	24,33	67,24	8,43	0,49	23,85	69,22	6,93	0,44
Malang	24,37	70,50	5,13	0,42	21,59	73,14	5,27	0,37
Probolinggo	26,81	68,49	4,70	0,46	26,71	68,82	4,47	0,45
Pasuruan	29,84	65,06	5,10	0,54	25,46	69,59	4,95	0,44
Mojokerto	23,16	70,43	6,41	0,42	23,48	71,16	5,36	0,41
Madiun	22,93	69,04	8,04	0,45	24,70	68,39	6,91	0,46
Surabaya	25,65	70,83	3,51	0,41	21,29	74,19	4,52	0,35
Batu	-	-	-		24,45	68,27	7,28	0,46
Rata-rata	25,09	68,87	6,04		24,06	70,00	5,94	

Ket: DR = *Dependency Ratio* = (jumlah penduduk usia 0-14 th + jumlah penduduk usia > 64 th) dibagi jumlah penduduk usia 15-64 th.

Sumber: Susenas Propinsi Jawa Timur diolah

Tabel 3 menunjukkan penduduk Jawa Timur Wilayah Kota berdasarkan kelompok umur. Besarnya penduduk kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) di wilayah Kediri dan Madiun mengalami penurunan. Untuk wilayah Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto dan Surabaya mengalami kenaikan. Dengan kenaikan penduduk kelompok usia produktif, maka beban penduduk usia produktif semakin kecil. Indikator ini ditunjukkan oleh *dependency ratio*. Semakin rendah angka *dependency ratio* semakin baik karena jumlah penduduk yang ditanggung oleh setiap penduduk usia kerja semakin rendah.

Rata-rata *dependency ratio* di Jawa Timur Wilayah Kota tahun 2005 lebih baik dibanding tahun 2000. Hal ini disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) angka kelahiran turun dan penduduk usia lanjut turun seperti Blitar, Probolinggo dan Pasuruan, (2) penurunan angka kelahiran lebih besar dibandingkan dengan bertambahnya harapan hidup penduduk usia lanjut seperti Surabaya dan (3) penurunan jumlah penduduk usia lanjut lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kelahiran seperti di Mojokerto. Rendahnya *dependency*

*ratio* kota Malang pada tahun 2005 karena kota Malang dibagi menjadi kota Malang dan kota Batu.

### **Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Undang-Undang *Employment Status* No. 14 tahun 1969). Dalam membahas ketenagakerjaan, umumnya tenaga kerja dapat dikelompokkan menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Tenaga kerja di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota berdasarkan lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2000**  
**Berdasarkan Lapangan Usaha Utama**

Wilayah Kota	Pertanian	Pertambangan & Galian	Industri	Listrik, Gas & Air	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa
Kediri	5,20	0,31	23,56	0,71	7,04	32,35	6,13	2,25	22,45
Blitar	12,42	0,30	10,60	0,20	5,25	35,22	9,56	1,92	24,53
Malang	1,91	0,41	18,91	0,10	4,62	32,66	6,17	5,71	29,52
Probolinggo	14,37	0,05	13,63	0,40	4,28	26,29	16,93	2,54	21,41
Pasuruan	6,79	0,26	30,34	0,72	3,14	31,26	8,87	2,04	16,58
Mojokerto	3,79	-	29,23	0,19	3,10	30,77	8,54	2,13	22,24
Madiun	2,71	0,25	9,48	0,62	3,20	30,91	10,22	2,96	39,66
Surabaya	2,17	0,27	23,75	0,90	6,15	35,21	11,82	3,82	15,90
Rata-rata	6,17	0,26	19,94	0,48	4,59	31,83	9,78	2,92	24,03

**Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah**

Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan 2005 mayoritas (>50%) penduduk Jawa Timur Wilayah Kota bekerja di sektor industri dan perdagangan. Bahkan untuk wilayah kota Pasuruan dan Mojokerto, penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan lebih dari 60%. Padahal persentase terbesar penduduk Jawa Timur berdasarkan lapangan usaha utama ada di sektor pertanian yaitu sebesar 45,02 persen (2004) dan 42 persen (2005). Komposisi tersebut relatif konstan selama 5 tahun.

Tumbuhnya kegiatan ekonomi khususnya di bidang perdagangan di wilayah kota ini merupakan resultan dari suramnya perekonomian yang bersifat global akibat krisis ekonomi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997, yang berdampak pada PHK di sektor formal. Para pekerja yang mengalami PHK maupun angkatan kerja baru yang tidak tertampung di sektor formal beralih usaha di sektor informal yang tidak membutuhkan modal besar serta kemampuan yang terlalu tinggi, misalnya dengan membuka usaha warung atau rumah makan dan pedagang kelontong.

**Tabel 5:**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2005**  
**Berdasarkan Lapangan Usaha Utama**

Wilayah Kota	Pertanian	Pertambangan & Galian	Industri	Listrik, Gas & Air	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa
Kediri	3,51	1,17	22,29	0,81	3,41	38,60	5,49	2,60	22,02
Blitar	8,90	0,10	10,99	0,50	6,30	35,17	7,49	1,79	28,66
Malang	2,12	0,17	20,82	0,35	7,26	31,67	9,64	3,99	23,80
Probolinggo	11,26	0,10	14,84	0,10	5,02	32,13	16,03	1,57	18,77
Pasuruan	5,30	-	31,36	0,49	2,73	29,43	9,01	1,86	19,73
Mojokerto	2,25	-	26,76	0,29	5,18	30,51	9,19	3,42	21,90
Madiun	6,09	0,64	10,05	0,43	3,96	35,89	8,65	4,06	30,24
Surabaya	0,79	0,63	21,87	0,21	6,18	35,34	8,61	5,76	20,50
Batu	40,42	0,26	6,51	0,07	6,57	25,00	5,16	2,05	13,98
Rata-rata	8,96	0,29	18,39	0,36	5,20	32,64	8,81	3,01	22,18

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

Tingginya komposisi penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota menunjukkan terjadinya perubahan struktur permintaan dan produksi (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di wilayah tersebut meningkat. Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan persentase penduduk Jawa Timur Wilayah Kota dibagi berdasarkan jenis pekerjaan.

**Tabel 6**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2000**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama**

Wilayah Kota	Pemimpin /Manager	Tenaga Ahli	Ass Ahli	Tenaga Prod	Tenaga TU / Tk Lanjut	Tenaga TU / Tk Menengah	Pek. Prod / Trans Tk Menengah	Tenaga TU/ Tk Rendah	Pegawai & Pek terkait	Lainnya
Kdr	0,94	11,24	0,23	5,62	0,94	17,58	0,23	34,89	28,33	-
Btr	1,27	11,17	3,55	8,35	0,25	14,24	-	39,60	21,56	-
Mlg	0,63	9,70	6,25	19,94	1,30	17,90	0,26	20,92	22,84	0,26
Prob	5,04	12,98	5,00	8,79	1,21	8,95	0,40	33,42	24,06	0,17
Prsn	0,81	9,82	-	13,36	0,81	9,96	2,51	49,68	12,55	-
Mjkt	1,82	8,57	1,81	13,75	1,57	14,99	0,78	39,23	17,49	-
Mdn	0,91	11,24	0,61	9,43	0,61	41,68	-	22,75	12,77	-
Sby	2,42	6,19	2,72	11,03	1,21	28,25	3,02	28,55	16,47	0,15
Rata-rata	1,73	10,11	2,88	11,28	0,99	19,19	1,20	33,63	19,51	0,19

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Prsn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya

Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah



Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota berdasarkan jenis pekerjaan utama. Persentase rata-rata tenaga profesional atau manager meningkat sebesar 6,45 persen yaitu dari 1,72 persen (2000) menjadi 8,17 persen (2005). Artinya Semakin besar rasio orang yang bekerja sebagai tenaga profesional dan tenaga ketatalaksanaan maka semakin besar pendapatan per kapita di daerah tersebut (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000).

Pada tahun 2000, persentase manajer terbanyak ada di kota Surabaya yaitu sebesar 2,42 persen (Tabel 6) namun pada tahun 2005, persentase profesional terbanyak ada di kota Madiun dan Blitar masing-masing sebesar 9,83 persen dan 9,59 persen (Tabel 7). Keadaan ini timbul sebagai hasil dari proses akumulasi dan alokasi yang terjadi. Membaiknya sarana dan prasarana perhubungan akibat dari terjadinya proses akumulasi, menyebabkan konsumen yang dapat dijangkau oleh setiap unit usaha semakin luas. Kondisi ini menyebabkan unit-unit usaha berkembang pesat dan terjadi proses spesialisasi (*division of labor*) yang menciptakan tenaga-tenaga profesional. Selain itu, perkembangan unit usaha akan menimbulkan penjenjangan pada struktur organisasi perusahaan sehingga jumlah manajer cenderung untuk meningkat.

**Tabel 7**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2005**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama**

Wilayah Kota	Profesional	Tata Usaha	Penjualan	Jasa	Pertanian	Produksi	Lainnya
Kediri	6,66	7,82	33,91	9,45	4,59	37,13	0,45
Blitar	9,59	9,59	26,68	14,68	8,00	29,87	1,70
Malang	7,38	5,38	26,81	21,13	2,20	35,97	1,13
Probolinggo	7,33	7,04	23,72	12,88	10,96	37,08	0,98
Pasuruan	7,25	8,59	25,23	8,88	5,30	43,38	1,37
Mojokerto	5,96	14,96	26,50	8,60	2,15	39,68	2,15
Madiun	9,83	14,53	27,55	14,85	6,84	23,83	2,57
Surabaya	6,92	14,90	29,58	14,69	1,43	31,48	1,00
Batu	4,48	4,76	19,88	10,47	40,13	20,02	0,27
Rata-rata	8,18	9,73	26,65	12,85	9,07	33,16	1,29

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan persentase penduduk Jawa Timur Wilayah Kota berdasarkan status pekerjaan. Rata-rata penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap tahun 2000 sebesar 39,17 persen dan pada tahun 2005 sebesar 37,32 persen. Angka ini menunjukkan adanya penurunan. Sedangkan buruh / pekerja dibayar pada tahun 2000 dan 2005 masing-masing sebesar 55,30 persen dan 58,34 persen. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan.

**Tabel 8**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2000**  
**Berdasarkan Status Pekerjaan Utama.**

Wilayah Kota	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Buruh / Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar
Kediri	24,07	9,39	1,63	60,10	4,80
Blitar	34,65	8,97	3,01	48,03	5,33
Malang	22,31	7,61	4,67	59,35	6,05
Probolinggo	29,66	9,67	2,32	52,03	6,32
Pasuruan	30,72	8,86	2,96	51,29	6,17
Mojokerto	32,01	6,71	3,12	53,10	5,06
Madiun	27,46	8,25	3,33	56,27	4,68
Surabaya	22,64	6,68	2,60	62,19	5,89
Rata-rata	27,94	8,27	2,96	55,30	5,54

Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah

Penurunan penduduk yang berusaha sendiri dan kenaikan penduduk yang menjadi pekerja disebabkan cara pembagian kerja yang berdasarkan pada ikatan keluarga mulai ditinggalkan dan mulai mendasarkan pembagian kerja atas kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan. Kebutuhan akan keterampilan dan kemampuan tertentu mendorong tiap-tiap unit usaha untuk menggaji atau mempekerjakan orang-orang yang dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000).

**Tabel 9**  
**Persentase penduduk Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Tahun 2005**  
**Berdasarkan Status Pekerjaan Utama.**

Wilayah Kota	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Buruh / Pekerja Dibayar	Pekerja Bebas Di Pertanian	Pekerja Bebas Di Non Pertanian	Pekerja Tidak Dibayar
Kediri	28,23	8,28	2,25	51,89	0,72	2,42	6,21
Blitar	25,79	8,58	4,69	53,34	1,40	2,40	3,80
Malang	23,80	6,77	5,03	59,54	0,43	2,17	2,26
Probolinggo	28,88	9,07	2,93	44,22	5,04	5,67	4,19
Pasuruan	30,65	3,22	3,41	58,43	2,11	0,82	1,36
Mojokerto	26,80	5,28	7,13	50,53	0,68	4,79	4,78
Madiun	26,91	6,30	4,17	54,82	1,60	2,03	4,16
Surabaya	20,87	5,23	4,17	65,19	0,00	1,37	3,17
Batu	23,44	11,26	2,74	29,94	17,62	5,92	9,09
Rata-rata	26,15	7,11	4,06	51,99	3,29	3,07	4,34

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

## Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk menggambarkan kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu wilayah. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas SDM.

**Tabel 10**  
**Persentase Penduduk Jawa Timur Wilayah Kota Usia 10 Tahun Ke Atas**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2000**

Wilayah Kota	Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD / MI	SD / MI	SLTP Sederajat	SMU Sederajat	SMK Sederajat	Diploma I / II	Diploma III	Diploma IV / S1	S2 / S3
Kdr	5,83	10,44	32,66	22,12	14,31	8,56	0,79	1,68	3,57	0,05
Btr	6,19	18,68	28,30	21,54	11,58	8,50	0,99	1,56	2,66	-
Mlg	4,60	13,46	21,73	19,88	21,88	8,24	1,82	0,85	7,45	0,10
Prob	11,78	18,98	27,91	16,83	10,66	9,41	0,95	0,67	2,74	0,06
Psrn	7,92	21,85	31,28	17,47	12,37	5,28	0,34	0,11	3,38	-
Mjkt	5,85	15,59	25,72	19,60	16,21	10,70	0,73	1,70	3,82	0,10
Mdn	4,72	9,18	23,20	24,13	17,83	11,80	1,03	3,05	4,95	0,11
Sby	4,67	9,51	25,45	21,48	23,32	8,31	0,40	1,55	5,23	0,08
Rata-rata	6,44	14,71	27,03	20,38	16,02	8,85	0,88	1,39	4,22	0,08

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psrn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya

Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2000 (Tabel 10), rata-rata jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum sekolah adalah 6,44 persen namun pada tahun 2005 (Tabel 11) angka ini mengalami penurunan menjadi rata-rata sebesar 4,99 persen. Sebaliknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi pada tahun 2000 adalah 78,85 persen (Tabel 10) dan pada tahun 2005 adalah 80,94 persen (Tabel 11). Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan program wajib belajar yang telah dilakukan pemerintah.

**Tabel 11**  
**Persentase Penduduk Jawa Timur Wilayah Kota Usia 10 Tahun Ke Atas**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2005**

Wilayah Kota	Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD / MI	SD / MI	SLTP Sederajat	SMU Sederajat	SMK Sederajat	Perguruan Tinggi
Kdr	4,42	16,11	25,40	20,36	17,59	8,57	7,54
Btr	3,62	13,16	26,06	20,49	20,17	9,48	7,01
Mlg	3,88	13,55	23,08	18,44	22,29	7,53	11,23
Prob	11,28	17,22	27,04	17,36	13,86	7,52	5,70
Psm	4,19	14,95	32,12	17,60	17,04	8,63	5,47
Mjkt	3,52	12,03	21,75	18,88	26,51	9,64	7,68

Mdn	4,13	13,09	19,39	18,83	23,31	10,88	10,38
Sby	3,33	9,40	21,18	19,03	25,42	10,03	11,61
Batu	6,56	17,10	32,88	19,58	13,97	3,72	6,19
Rata-rata	4,99	14,07	25,43	18,96	20,02	8,44	8,09

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psrn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*) dan Tingkat Partisipasi Bersekolah

Pembangunan yang telah dilakukan selama ini ternyata menyisakan banyak permasalahan. Pendekatan ekonomi saja tidaklah cukup untuk menjawab seluruh permasalahan itu. Pergeseran visi pengambil kebijakan juga dapat menyebabkan arah pembangunan secara umum akan mengalami pergeseran. Pada pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan proses mekanisme pasar dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa tingkat upah buruh yang murah serta sumber daya alam yang melimpah ternyata tidaklah menjamin proses pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar. Asumsi dasar yang bertumpu pada mekanisme pasar persaingan sempurna tidak dapat berjalan dengan baik sehingga campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan menjadi pilihan utama. Berkaitan dengan pengembangan SDM dan adaptasi teknologi (Krause, 1989) untuk mencapai tingkat keunggulan kompetitif maka kebijakan yang menekankan pada kualitas SDM dapat mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan.

**Tabel 12**  
**Persentasi Penduduk 10 Tahun ke Atas Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Menurut Status Ketenagakerjaan Tahun 2000.**

Ket	Kdr	Btr	Mlg	Prob	Psrn	Mjkt	Mdn	Sby	Batu
Angkatan kerja	<b>51,81</b>	<b>53,98</b>	<b>51,94</b>	<b>50,41</b>	<b>48,83</b>	<b>53,45</b>	<b>48,70</b>	<b>52,91</b>	-
Bekerja	48,49	51,64	47,71	48,28	46,64	49,81	44,13	50,37	-
Mencari Pekerjaan	3,31	2,34	4,22	2,13	2,19	3,64	4,57	2,54	-
Bukan Angkatan Kerja	<b>48,19</b>	<b>46,02</b>	<b>48,06</b>	<b>49,59</b>	<b>51,17</b>	<b>46,55</b>	<b>51,30</b>	<b>47,09</b>	-
Sekolah	20,00	20,92	18,11	15,07	17,18	16,69	19,40	15,22	-
Mengurus Rumah Tangga	18,30	17,65	19,20	26,54	23,78	18,57	21,73	21,29	-
Lainnya	9,89	7,45	10,75	7,99	10,22	11,28	10,17	10,58	-
Total	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psrn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya  
**Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah**

Tabel 12 menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota pada tahun 2000 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*) di masing-masing wilayah kota adalah sebesar 48,70 persen sampai dengan 53,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia 10 tahun ke atas terbesar ada di Kota Blitar dan terkecil ada di Kota Madiun.

Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS) pada Tabel 13 menunjukkan bahwa **status tidak / belum bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Probolinggo sebesar 11,78 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Surabaya sebesar 4,67 persen. Sedangkan **status masih bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Malang sebesar 25,71 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Mojokerto sebesar 18,57 persen dan untuk **status tidak bersekolah lagi** paling banyak ditemukan di Kota Mojokerto sebesar 75,58 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Malang sebesar 68,69 persen.

**Tabel 13**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota Menurut Tingkat Partisipasi Bersekolah Tahun 2000**

Ket	Kdr	Btr	Mlg	Prob	Psrn	Mjkt	Mdn	Sby	Batu
Tidak / Belum Pernah Sekolah	5,83	6,19	4,60	11,78	7,92	5,85	4,72	4,67	-
Masih Bersekolah	21,48	21,60	25,71	22,77	19,02	18,57	20,98	20,54	
Tidak Bersekolah Lagi	72,69	72,21	68,69	72,63	73,06	75,58	74,30	74,79	-
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	-

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psrn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya  
**Sumber: Susenas 2000 Propinsi Jawa Timur diolah**

Tabel 14 menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota pada tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*) di masing-masing wilayah kota adalah sebesar 57,73 persen sampai dengan 62,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia 10 tahun ke atas terbesar ada di Kota Surabaya dan terkecil ada di Kota Probolinggo.

**Tabel 14**  
**Persentasi Penduduk 10 Tahun ke Atas Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota**  
**Menurut Status Ketenagakerjaan Tahun 2005**

Ket	Kdr	Btr	Mlg	Prob	Psrn	Mjkt	Mdn	Sby	Batu
Angkatan kerja	<b>61,22</b>	<b>57,88</b>	<b>59,50</b>	<b>57,73</b>	<b>58,93</b>	<b>60,40</b>	<b>57,75</b>	<b>62,50</b>	<b>61,29</b>
Bekerja	52,40	48,41	50,16	49,01	48,34	50,02	47,13	54,46	55,12
Mencari Pekerjaan	8,82	9,47	9,34	8,72	10,59	10,38	10,62	8,04	6,17
Bukan Angkatan Kerja	<b>38,78</b>	<b>42,12</b>	<b>40,50</b>	<b>42,27</b>	<b>41,07</b>	<b>39,60</b>	<b>42,25</b>	<b>37,50</b>	<b>38,71</b>
Sekolah	16,91	16,16	22,10	15,32	16,70	15,10	17,38	13,95	15,39
Mengurus Rumah Tangga	15,97	18,61	13,99	21,77	18,82	17,64	18,23	17,57	18,67
Lainnya	5,90	7,35	4,41	5,18	5,55	6,86	6,64	5,98	4,65
Total	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psrn = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS) pada Tabel 15 menunjukkan bahwa **status tidak / belum bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Probolinggo sebesar 11,28 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Surabaya sebesar 3,33 persen. Sedangkan **status masih bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Malang sebesar 25,98 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Probolinggo sebesar 16,99 persen dan untuk **status tidak bersekolah lagi** paling banyak ditemukan di Kota Mojokerto sebesar 78,99 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Malang sebesar 70,14 persen.

**Tabel 15**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota**  
**Menurut Tingkat Partisipasi Bersekolah Tahun 2005**

Ket	Kdr	Btr	Mlg	Prob	Psrn	Mjkt	Mdn	Sby	Batu
Tidak / Belum Pernah Sekolah	4,42	3,62	3,88	11,28	4,19	3,52	4,13	3,33	6,56
Masih Bersekolah	18,84	18,28	25,98	16,99	18,35	17,90	18,99	17,68	17,17

Tidak Bersekolah Lagi	76,73	78,09	70,14	71,72	77,46	78,58	76,89	78,99	76,27
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ket: Kdr = Kediri, Btr = Blitar, Mlg = Malang, Prob = Probolinggo, Psm = Pasuruan, Mjkt = Mojokerto, Mdn = Madiun dan Sby = Surabaya

Sumber: Susenas 2005 Propinsi Jawa Timur diolah

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, kesempatan kerja (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000), pendidikan dan budaya (Elfindri, 2001). **Dari Tabel 12 dan Tabel 14** dapat disimpulkan bahwa kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **tertinggi** di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota dari tahun 2000 hingga 2005 meningkat sebesar 8,52 persen yaitu dari 53,98 persen (Mojokerto) menjadi 62,50 persen (Surabaya). Kesempatan kerja pada tahun 2000 terbesar ada di Mojokerto karena ada dua produk unggulan yaitu sepatu sandal dan batik tulis yang masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 4.101 orang dan 60 orang (Santoso, 2003). Sedangkan kesempatan kerja pada tahun 2005 terbesar di Surabaya karena terjadinya penambahan perusahaan dari perorangan hingga perseroan terbatas sebanyak 587 perusahaan yaitu dari 5.549 perusahaan (2000) menjadi 6.136 perusahaan (2005) (BPS, 2005).

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **terendah** di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota dari tahun 2000 hingga 2005 meningkat sebesar 9,03 persen yaitu dari 48,70 persen (Pasuruan) menjadi 57,73 persen (Probolinggo). Pada tahun 2005, Kota Pasuruan tidak lagi penyerap tenaga kerja yang rendah karena masyarakat Pasuruan dikenal memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan pertumbuhan ekonominya digerakkan oleh sektor industri dan perdagangan (Santoso, 2003). Berbagai jenis industri kecil berkembang pesat mulai dari jenis furniture, kerajinan kayu, suku cadang / komponen mesin diesel, suku cadang / komponen perahu bermotor, hingga industri kecil cor dan logam. Sebaliknya Kota Probolinggo merupakan kota yang kesempatan kerjanya paling rendah karena kegiatan ekonomi terbesar masih di sektor pertanian. Namun petani masih kurang memperhatikan tanah perbukitan (Santoso, 2003).

**Dari Tabel 13 dan Tabel 15** dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Sekolah di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota status belum / tidak pernah bersekolah mengalami penurunan sebesar 1,45 persen yaitu dari 6,45 persen (2000) menjadi 4,99 persen (2005). Artinya telah timbul kesadaran di masyarakat akan pentingnya sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat ekonom neo klasik seperti Theodore Schultz, Harvey Leibenstein dan Garry S. Becker yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai bagian dari investasi yang memberikan keuntungan.

Status masih bersekolah juga mengalami penurunan sebesar 2,42 persen yaitu dari 21,33 persen (2000) menjadi 18,91 persen (2005). Sedangkan status tidak bersekolah lagi mengalami kenaikan sebesar 3,10 persen yaitu dari 72,99 persen (2000) menjadi 76,09 (2005). Maknanya bahwa penduduk berusia di atas 10 tahun telah banyak yang menyelesaikan pendidikannya. Hal ini akan menyebabkan penduduk mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan membuka kesempatan individu untuk memilih pekerjaan (Elfindri, 2001).

### **Akumulasi Modal Manusia (*Human Capital Stock*)**

Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja walaupun jumlahnya melimpah tidak dapat begitu saja dicatat sebagai keunggulan komparatif. Hal ini harus dilihat dari tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan kualitas yang rendah maka produktivitas yang dihasilkan akan rendah pula. Akibatnya dibutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan hasil per unitnya. Dengan demikian akhirnya harga suatu produk akan menjadi mahal. Demikian juga nilai tambah yang diberikan oleh suatu produk tidak selalu berarti mempunyai keunggulan kompetitif, jika produk tidak mampu bersaing secara kompetitif di pasar.

Kriteria suatu produk yang baik adalah mempunyai nilai tambah, mempunyai keunggulan komparatif dan juga mempunyai keunggulan kompetitif. Selanjutnya strategi yang dapat ditempuh yaitu melakukan pembangunan dengan penekanan modal manusia dan pengembangan teknologi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kebijakan ekonomi makro sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan strategi akumulasi modal manusia. Kemajuan-kemajuan dalam komponen kualitas SDM seperti pendidikan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan meningkatkan *derived demand* terhadap keahlian khususnya yang berasal dari industri manufaktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan angkatan kerja telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Piramida latar belakang pendidikan angkatan kerja semakin lama berangsur-angsur menuju ke manusia dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2000 angkatan kerja yang tidak berpendidikan sebesar 6,44 persen (Tabel 10) dan pada tahun 2005 turun menjadi 4,99 persen (Tabel 11) atau turun sebesar 1,45 persen. Selain itu, angkatan kerja yang tamat SD / SLTP juga mengalami penurunan sebesar 3,02 persen di mana pada tahun 2000 sebesar 47,41 persen (Tabel 10) dan pada tahun 2005 sebesar 44,39 persen (Tabel 11). Hal ini disebabkan adanya peningkatan pendidikan angkatan kerja yang tamat SMU atau SMK sebesar 3,59 persen dan yang tamat perguruan tinggi naik sebesar 1,53 persen (bandingkan Tabel 10 dengan Tabel 11).

Pergeseran stok modal manusia seperti ini secara sinergis erat kaitannya dengan faktor penawaran yang berasal dari kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan



kesehatan masyarakat. Kondisi ini didukung melalui manfaat *eksternalities* dari pertumbuhan ekonomi. Keputusan investasi modal manusia terjadi dari dua sisi. Pertama adalah semakin tingginya peranan individu atau rumah tangga sebagai pelaku pengambil kebijakan modal manusia. Di sisi lain, semakin besar peranan pemerintah dalam memfasilitasi permintaan terhadap komoditi jasa pembentuk modal manusia seperti akses pendidikan formal, akses pelayanan kesehatan dengan penyediaan kebutuhan publik untuk itu (Elfindri, 2001).

Peningkatan kualitas SDM akan memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa. Penelitian Chenery (1986) menunjukkan bahwa selama proses industrialisasi berlangsung, peranan stok modal manusia (kualitas tenaga kerja, teknologi dan partisipasi masyarakat) pada: (1) negara maju memberikan kontribusi hampir separuh dari seluruh penyumbang nilai tambah dan (2) negara berkembang memberikan kontribusi 20 – 30 persen dari seluruh penyumbang nilai tambah. Bagi Indonesia, kontribusi modal manusia terhadap nilai tambah sebesar 15 – 25 persen (Elfindri, 2001). Artinya kontribusi modal manusia terhadap nilai tambah di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi modal manusia di negara-negara berkembang.

Salah satu model pengembangan SDM adalah Model Lucas dan Verry (1989). Lucas dan Verry menunjukkan bahwa pembentuk sumber daya manusia perlu diarahkan pada pembentukan perkonomian berdasarkan *human resource intensive products* dan pendidikan perlu diberikan untuk menjadi individu memiliki keahlian dasar yaitu pendidikan berhitung, fasilitas komputer dan bahasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan struktur ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Timur Wilayah Kota tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*) di masing-masing wilayah kota adalah sebesar 48,70 persen sampai dengan 53,98 persen. Tertinggi ada di Kota Surabaya dan terendah ada di Kota Probolinggo.

Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS) **status tidak/belum bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Probolinggo sebesar 11,28 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Surabaya sebesar 3,33 persen. Sedangkan **status masih bersekolah** paling banyak ditemukan di Kota Malang sebesar 25,98 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Probolinggo sebesar 16,99 persen dan untuk **status tidak bersekolah lagi** paling banyak ditemukan di Kota Mojokerto sebesar 78,99 persen dan jumlah terkecil ditemukan di Kota Malang sebesar 70,14 persen.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas maka diperlukan kebijakan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maupun kondisi Tingkat Partisipasi

Sekolah melalui: (1) penentuan jenis keahlian yang diperlukan, (2) menentukan jenis *training* untuk mendapatkan keahlian yang diperlukan oleh berbagai pihak dan (3) menentukan institusi yang akan dapat menyediakan jenis *training*. Peningkatan pendidikan ini pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru dan masyarakat yang memiliki akumulasi modal manusia yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Boediono, dkk. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- Badan Pusat Statistik, 2000. *Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2005. *Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2005 Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2005. *Kota Madya Surabaya Dalam Angka 2005 – 2006*. Katalog BPS 1403.3578. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Career, Camille. 1999. The Training and Development Needs of Owner-Managers of Small Business with Export Potential, *Journal of Small Business Management*, Vol. 37 No. 4 October: 30 – 41.
- Chenery, Hollis. 1986. *Industrialization and Growth*. A World Bank Research Publication.
- Cochran, C.L. & Maleno, E.F. 1995. *Public Policy Perspectives and Choices*. New York: Mc GrawHill, Inc.
- Elfindri, 2001. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Padang: Penerbit Universitas Andalas.
- Jantti, M. 1997. Inequality in Five Countries in the 1980s: the Role Demographic shifts, Markets, and Government Policies (Canada, Great Britain, Netherlands, Sweden and the United States). *Economica* No.6, 1997.

- Koestoer, dkk. 2001. *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kompas, *Daya Saing Mombaik*. 22 September 2006.
- Kompas, *Terperangkap Involusi Tak Berkesudahan*. 9 Desember 2006.
- Krause, L.B. 1989. *Issues of Macro adjustment Affecting Human Resources Development in Malaysia: A Human Resource Strategy*, mimeo.
- Lembaga Demografi FE-UI, 1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lucas, R.E.B dan Don Verry. 1989. *Human Resource Development Project: Draft Final Report*. Malaysian EPU/UNDP/ILO-ARTEP Project, Mimeo.
- Marshall, J dan Michael, P. 1999. *Education Policy*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc.
- Mincer, Jacob. 1958. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, p. 281 – 302.
- Moeljadi. 1999. *Pengaruh Beberapa Faktor Internal Perusahaan dan Program Asistensi Pemerintah terhadap Kinerja Industri Kecil di Jawa Timur*. Unpublished. Disertasi. Unair.
- Morrison, Alison dan John Breen. 2003. Small Business Growth Intention, Ability and Opportunity, *Journal of Small Business Management*, Vol. 41 No. 4 October: 417 – 425.
- Naro, Zainimar. 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Pengrajin dan Penyerapan Tenaga kerja pada Industri Kecil Bordir di Jawa Timur*. Unpublished. Disertasi. Unair.
- Santoso, Harianto F (editor). 2003. *Profil Daerah: Kabupaten dan Kota*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Porter, Michael E., 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Susanti, Hera; Moh. Ikhsan dan Widyanti, 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi* 2<sup>nd</sup> ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suwarto, F.X. 2006. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Partisipasi Bersekolah Dari Akumulasi Modal Manusia, *Jurnal Manajemen Th.* X/02/Juni/2006: 148 – 159.

Wren, D.A. 1994. *The Evolution of Management Thought*. Singapore: John Wiley & Sons.